



Kalpataru

**JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH**



Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia
Palembang



**Pemanfaatan Museum Tour Virtual
Sebagai Sumber Media Pembelajaran
Sejarah di Era Digitalisasi**
Herdin Muhtarom, Abduloh Arif Robin, Andi

**Analisis Sumber Pembelajaran Lokal Pada
Mata Pelajaran IPS Kelas IV**
*Yuyun Paherli Pahrir, Muhamad Idris, Erfan
Ramadhani*

**Pengembangan Media Pembelajaran E-
Flashcard Terhadap Keterampilan
Bercerita Sejarah Lahirnya Pancasila
Siswa Kelas V SD**
*Hikmah Ayu Lastari, Destiniar, Susanti Fajpri
Selegi*

**Penerapan Media Ular Tangga Pada
Pembelajaran IPS Materi Peristiwa
Kebangsaan Seputar Proklamasi
Kemerdekaan di Kelas V SD Negeri 32
Palembang**
Tyara Yolanda, Muhamad Idris, Ida Suryani

**Lembaga Kemahasiswaan Dalam Kemelut
Universitas Kristen Satya Wacana 1993-
1995**
*Ezra Gerry Yohanes Lewu, Emy Wuryani, Tri
Widiarto*

**Pengaruh Model Pembelajaran Talking
Stick Terhadap Pemahaman Siswa Pada
Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD**
*Hasanah, Susanti Fajpri Selegi, Puji
Ayurachmawati*

**Video Distribusi Kerupuk Kemplang
Budaya Kuliner Khas Kota Palembang**
*Eliza Nazriani, Muhamad Idris, Kiki
Aryaningrum*

**Adaptasi Pelayanan Museum Pusat TNI AD
Dharma Wiratama Sebagai Sejarah Publik
di Masa Pandemi Covid-19**
*Muhammad Haikal, Rinita Meliya, Aulia Ulfa
Utami, Raden Roro Zulfah Aulia, Muhamad
Abi, Andi*

**Pencitraan Budaya Politik Dalam Motif
Tenun Songket Palembang Abad Ke-18-19
Masehi**
*Annisa Putri Ramadhanti, Muhamad Idris,
Ahmad Zamhari*

**Penyusunan Modul Asesmen
Pembelajaran Sejarah: Pembelajaran
Paradigma Baru**
Eva Dina Chairunisa

Kalpataru

Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Volume 8, Nomor 2, Desember 2022

Chief Editor

Assoc. Prof. Drs. Sukardi, M.Pd.

Editor

Dr. Muhamad Idris, M.Pd.
Eva Dina Chairunisa, M.Pd.
Jeki Sepriady, S.Pd.

Reviewer

Dr. Tahrun, M.Pd.	(Universitas PGRI Palembang)
Drs. Supriyanto, M.Hum.	(Universitas Sriwijaya Palembang)
Dra. Retno Purwati, M.Hum.	(Balai Arkeologi Sumatera Selatan)
Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A.	(Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumsel)
Dr. Budi Agung Sudarman, S.S., M.Pd.	(Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan)
Dr. Purmansyah, M.A.	(Universitas Muhammadiyah Palembang)

Alamat Redaksi

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang
Telp. 0711-510043
Email: jurnalkalpatarusejarah@gmail.com
Website: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa>

Terbit dua kali setahun pada
Juli dan Desember

Diterbitkan oleh:
Program Studi Pendidikan
Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang

Gambar Cover:
Pohon Kalpataru
Candi Prambanan



Koleksi: Muhamad Idris

DAFTAR ISI

Pemanfaatan Museum <i>Tour Virtual</i> Sebagai Sumber Media Pembelajaran Sejarah di Era Digitalisasi <i>Herdin Muhtarom, Abduloh Arif Robin, Andi</i>	111-118
Analisis Sumber Pembelajaran Lokal Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV <i>Yuyun Paherli Pahrir, Muhamad Idris, Erfan Ramadhani</i>	119-129
Pengembangan Media Pembelajaran <i>E-Flashcard</i> Terhadap Keterampilan Bercerita Sejarah Lahirnya Pancasila Siswa Kelas V SD <i>Hikmah Ayu Lastari, Destiniar, Susanti Faipri Selegi</i>	130-138
Penerapan Media Ular Tangga Pada Pembelajaran IPS Materi Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan di Kelas V SD Negeri 32 Palembang <i>Tyara Yolanda, Muhamad Idris, Ida Suryani</i>	139-144
Lembaga Kemahasiswaan Dalam Kemelut Universitas Kristen Satya Wacana 1993-1995 <i>Ezra Gerry Yohanes Lewu, Emy Wuryani, Tri Widiarto</i>	145-157
Pengaruh Model Pembelajaran <i>Talking Stick</i> Terhadap Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas IV SD <i>Hasanah, Susanti Faipri Selegi, Puji Ayurachmawati</i>	158-168
Video Distribusi Kerupuk Kemplang Budaya Kuliner Khas Kota Palembang <i>Eliza Nazriani, Muhamad Idris, Kiki Aryaningrum</i>	169-175
Adaptasi Pelayanan Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama Sebagai Sejarah Publik di Masa Pandemi Covid-19 <i>Muhammad Haikal, Rinita Meliya, Aulia Ulfa Utami, Raden Roro Zulfah Aulia, Muhamad Abi, Andi</i>	176-183
Pencitraan Budaya Politik Dalam Motif Tenun Songket Palembang Abad Ke-18-19 Masehi <i>Annisa Putri Ramadhanti, Muhamad Idris, Ahmad Zamhari</i>	184-193
Penyusunan Modul Asesmen Pembelajaran Sejarah: Pembelajaran Paradigma Baru <i>Eva Dina Chairunisa</i>	194-200

**LEMBAGA KEMAHASISWAAN DALAM KEMELUT UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
1993-1995**

Ezra Gerry Yohanes Lewu

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
Email: ezralewu@gmail.com

Emy Wuryani

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
Email: emy.wuryani@uksw.edu

Tri Widiarto

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
Email: tri.widiarto@uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait keberadaan Lembaga Kemahasiswaan (LK) sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam sebuah lembaga pendidikan yang sedang mengalami konflik internal yaitu ketika dilaksanakannya pemilihan rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) selama awal sampai dengan pertengahan tahun 1990-an yang di mana masa tersebut juga merupakan masa-masa pra reformasi. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan yaitu berupa wawancara, arsip serta literatur buku. Kemudian dilakukan analisis terhadap sumber-sumber berupa hasil wawancara kepada individu yang terlibat sebagai bagian dari LK, arsip-arsip berupa surat kabar yang terbit pada masa tersebut serta surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada peristiwa tersebut yang diperlengkapi dengan beberapa sumber buku. Hasil analisis terhadap sumber kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah kesimpulan yang akan menunjukkan gambaran umum terkait kemelut UKSW serta keberadaan dan peran LK sebagai wahana organisasi mahasiswa yang harus menghadapi gejolak baik dari internal maupun eksternal organisasi serta pasang surutnya kepercayaan mahasiswa kepada organisasi yang menjadi wadah berekspresi dalam lingkup istitusi pendidikan.

Kata Kunci: *Lembaga Kemahasiswaan, Mahasiswa, Konflik.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) memiliki tugas untuk mencetak generasi intelektual dan menghasilkan berbagai inovasi demi mendukung proses pembangunan nasional. Pada tahun 1956, UKSW berdiri dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (PTPG-KI) dibentuk sebagai perwujudan gagasan cemerlang yaitu untuk mempersiapkan calon pendidik (guru) dengan berlandaskan pada Firman Allah. Berlandaskan pada semangat bahwa "menyegani Tuhan adalah Pangkal Pengetahuan" yang dikutip dalam Alkitab pada Amsal 1 : 7a (O. Notohamidjojo, 2011:3). Dalam

upaya untuk mencapai hal tersebut, UKSW sadar bahwa keberadaan mahasiswa sangat berpengaruh dalam segala proses-proses yang ditempuh sehingga perlu adanya pemberian wadah yang sesuai bagi mahasiswa dalam mengembangkan diri sebagai bagian dari tujuan universitas secara khusus dan bagian dari masyarakat secara umum. Berlandaskan pada kesadaran tersebut maka pada 16 Maret 1967, dibentuklah Lembaga Kemahasiswaan (LK) sebagai wadah berorganisasi bagi mahasiswa yang berlandaskan pemikiran-pemikiran dari Dr (HC). O. Notohamidjojo selaku rektor pertama UKSW yang saat itu masih disebut sebagai Dekan PTPG-KI (Yafet Rissy, dkk, 2013:3).

Sejak awal perjalanannya, LK UKSW sudah berusaha untuk menjadi wadah yang diharapkan dapat membantu dalam penanganan masalah-masalah mahasiswa. Salah satu masa di mana LK harus berhadapan dengan situasi sulit adalah ketika terjadi konflik internal kampus yang dikenal dengan Kemelut UKSW pada periode 1993-1995. Secara umum peristiwa ini selama proses pemilihan rektor untuk periode 1993-1995 yang terpicu dari adanya ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Kurniawan yang merupakan salah satu mahasiswa yang menuliskan tentang peristiwa tersebut dalam Slamet Haryono (2002), adanya perbedaan hasil yang ditetapkan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) dengan "prediksi" serta hasil pandangan mayoritas warga kampus telah menjadi awal pemicu terjadinya konflik internal. Perlu diketahui bahwa dalam Surat Keputusan Yayasan No. 133 tahun 1988 dinyatakan bahwa Yayasan memiliki wewenang untuk menetapkan rektor terpilih sesuai dengan nama calon yang diusulkan oleh Senat Universitas (Slamet Haryono, 2002).

Keberadaan konflik inilah yang telah membawa LK sebagai organisasi mahasiswa intra kampus terlibat dalam berbagai peristiwa selama konflik terjadi. Hal ini selaras dengan pemahaman terkait organisasi mahasiswa yang dijabarkan oleh Sudarman (2004) dalam Ayodya Arya (2018) yang menyatakan bahwa organisasi mahasiswa merupakan wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa yang ada dalam sebuah PT yang kesemuanya merupakan untuk kepentingan mahasiswa.

Konflik dipahami sebagai sebagai proses benturan antar individu dengan dasar kepentingan masing-masing untuk memperebutkan suatu kemenangan dengan cara menggerakkan segala sumber kekuatan untuk memperolehnya (Novri Susan, 2009:12). Sumber kekuatan dari konflik itu sendiri bisa berupa ideologi, masa, isu kekerasan serta kekuatan militer. Hal ini akan terlihat dalam pembahasan di mana LK berada pada pusaran konflik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta sumber kekuatan yang saling berbenturan. Benturan-benturan inilah yang

kemudian menempatkan LK untuk mengambil sikap apakah sebagai representasi dari mahasiswa UKSW dalam lingkup kehidupan universitas.

Peran LK selama terjadinya konflik menjadi salah satu bahasan yang akan menjabarkan dampak yang dihasilkan maupun dirasakan sebagai wadah organisasi mahasiswa khususnya sepanjang masa-masa tersebut yang masih lekat dengan dimulainya pergerakan reformasi di Indonesia. Peran dijabarkan dalam Kamus Umum Bahasan Indonesia (1984:735) sebagai suatu bagian atau pemegang kepemimpinan utama sedangkan Ralph Linton (1956:114) mendefinisikan peranan sebagai sebuah aspek dinamis kedudukan atau status yaitu ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status atau kedudukannya maka dia sudah melaksanakan peranannya.

Keberadaan LK dalam UKSW pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 12 Tahun 2021 Pasal 14 di mana mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan diri, bakat dan minat melalui organisasi kemahasiswaan. Melalui Undang-Undang yang sama juga dalam pasal 77 diatur tentang mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan (ormawa) dengan paling sedikit memiliki fungsi yaitu mewadahi kegiatan mahasiswa dalam minat, bakat dan potensi; mengembangkan kepekaan, daya kritis, kepemimpinan, keberanian dan rasa kebangsaan; serta memenuhi kesejahteraan dan kepentingan mahasiswa, mengembangkan tanggungjawab sosial. Selain itu juga dalam statuta UKSW baik tahun 1988 maupun 2016 memberikan kedudukan khusus kepada LK untuk menjadi anggota dalam Senat Universitas mewakili mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi konstruktif sesuai dengan tugas-tugas pokok senat.

Kedudukan inilah yang kemudian secara sederhana menyatakan bahwa LK tidak dapat secara langsung terhindar dari konflik internal yang terjadi sepanjang tahun 1993-1995 dikarenakan kedudukannya yang secara otomatis mengambil bagian pada proses pemilihan rektor yang merupakan awal terjadinya

konflik. Penelitian ini pada akhirnya berusaha merekonstruksi pandangan terkait kemelut internal kampus dan peran LK sebagai wahana berorganisasi bagi mahasiswa UKSW selama terjadinya konflik serta berusaha melihat bagaimana LK sebagai sarana gerakan mahasiswa menunjukkan eksistensinya dalam kampus di masa pra reformasi. Menurut Dhaniel Dhakidae (1983 dalam Ipoh Jazima, 2013) pergerakan mahasiswa terdiri dari dua kelompok yang bergerak berdasarkan aspek perjuangan moral dan perhitungan politik praktis. Pergerakan moral sendiri dimaknai sebagai sebuah pergerakan yang berlandaskan ukuran benar dan salah sedangkan perhitungan politik praktis berbicara tentang kuat dan lemah.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu hasil analisis terhadap keberadaan organisasi mahasiswa yang mencakup peran dan keberadaannya dalam sebuah institusi pendidikan. Selain itu juga dapat menjadi sumber referensi terhadap perkembangan organisasi mahasiswa sebagai sarana aspirasi konstruktif dan gerakan mahasiswa khususnya pada masa mendekati sebelum reformasi negara Indonesia pada tahun 1998.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian sejarah dengan beberapa tahapan yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi serta analisis dan penulisan hasil. Sumber-sumber yang terkumpul adalah berupa hasil wawancara yang diperoleh dari individu yang secara langsung terlibat dalam lembaga kemahasiswaan pada periode tersebut, sumber selanjutnya adalah arsip-arsip surat kabar, buletin, serta surat resmi dari lembaga bersangkutan masa itu yang diperoleh dari perpustakaan pribadi milik Emy Wuryani yang saat itu merupakan tenaga pengajar di UKSW. Sumber lainnya diperoleh dari melalui literatur berupa artikel buku-buku pelengkap yang diperoleh baik secara *online* maupun dari perpustakaan pribadi milik LK. Terdapat juga sumber khusus yang tidak dipublikasikan secara resmi namun dimuat dalam sebuah *blog* pribadi.

Sumber-sumber tersebut kemudian akan melalui kritik dan ditemukan hasil analisis yang

kemudian diperlengkapi dengan hasil interpretasi yang direkonstruksi dari berbagai hasil analisis tersebut sehingga menemukan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemelut Universitas Kristen Satya Wacana 1993-1995

Awal mula kemelut jika pada garis besarnya dimulai sejak proses pemilihan rektor untuk periode 1993-1997. Kurniawan dalam Slamet Haryono (2002) menjelaskan bahwa kemenangan John Ihalauw (JOI) berdasarkan hasil keputusan YPTKSW terhadap pesaingnya yaitu Liek Wilarjo telah mendorong berbagai penolakan dari banyak pihak dalam tubuh kampus sendiri. Berbagai jenis perpecahan terjadi dimulai dari tingkat senat universitas sampai pada ranah mahasiswa. Puncaknya terjadi sebuah kejadian yang dianggap sebagai salah satu puncak kemelut yaitu di PHKnya Arief Budiman, seorang dosen Program Pascasarjana yang secara tegas menentang proses terpilihnya JOI sebagai rektor karena dinilainya cacat prosedur.

Kurniawan dalam Slamet Haryono (2002) menjabarkan bahwa pada awalnya, proses pemilihan rektor dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya mekanisme yang ditemui berupa tidak lanjut dari senat universitas atas surat dari rektor yang menjabat saat itu yaitu Willi Toisuta, Ph.D. yang ingin memberitahukan bahwa masa jabatannya akan segera habis dan harus ditindaklanjuti dengan pemilihan rektor yang baru. Sebagai tindak lanjut surat dari rektor tersebut, senat universitas berdasarkan hasil rapat 18 Februari 1993 memutuskan bahwa proses pemilihan rektor akan mengacu pada SK pengurus YPTKSW No. 133 tahun 1998 sebagai dasar dari tatacara pemilihan. Selain itu, diakui juga SK Pengurus Yayasan No. 29/1990 yang mengatur tentang Senat Universitas sebagai ketentuan yang akan dipakai dalam perjalanan proses pemilihan.

Dalam perjalanan proses pemilihan, interpretasi terhadap SK No. 133/1988 menjadi sesuatu yang masih dipertanyakan sehingga panitia pemilihan bersama dengan senat universitas harus mencari penegasan terhadap

interpretasi SK tersebut untuk memastikan bahwa penggunaannya dalam proses pemilihan rektor dapat dilakukan dengan tepat. Adanya kebutuhan mencari penegasan tersebut maka panitia pemilihan mengadakan pertemuan dengan pengurus yayasan untuk membicarakan interpretasi yang sesuai terkait SK. 133 tersebut. Kurniawan dalam Slamet Haryono (2002) menjabarkan yang secara garis besar beberapa hasil pertemuan tersebut yaitu: pertama bahwa SK 133/1988 telah sesuai dengan dasar hukumnya yaitu statuta dan akan dipegang teguh untuk dijalankan oleh lembaga; kedua bahwa wewenang menetapkan rektor terpilih ada pada yayasan dengan tetap memperhatikan berbagai situasi dan pandangan yang beralasan dari kehidupan kampus itu sendiri; ketiga pemilihan awal dilaksanakan dalam 2 tahapan yaitu pemilihan tingkat unit masing-masing baik itu unit pengajaran (fakultas) maupun unit pelayanan (biro/kantor) untuk mengusulkan nama-nama bakal calon. Selanjutnya dilakukan pemilihan tingkat senat yang akan menyaring nama-nama bakal calon yang di bawah oleh masing-masing perwakilan unit dalam senat untuk dipilih 3 nama calon rektor yang kemudian akan diusulkan kepada yayasan; keempat, senator merupakan wakil unit yang merepresentasikan suara dari unit/fakultas masing-masing sehingga anggota senat yang mewakili kepakaran tidak memperoleh hak suara. Salah satu yang menjadi keunikan disini adalah 2 orang perwakilan mahasiswa yang jika dilihat secara umum sebenarnya hanya mewakili 1 unit besar yang sama yaitu "mahasiswa" namun jika dilihat secara "representasi lembaga" mewakili 2 bagian yaitu lembaga legislatif mahasiswa dan lembaga eksekutif mahasiswa.

Setelah disampaikan penjelasan dari yayasan tersebut ternyata masih mengundang ketidakpuasan dari berbagai pihak tentang pemahaman yang muncul dari ketentuan pemilihan ini. Maka pada 27 Mei 1993 dilaksanakan rapat senator yang bertujuan untuk mendengarkan dan membahas penjelasan Yayasan terkait SK No. 133 ini. Dalam penyampaiannya, Haryono sebagai perwakilan Dewan Pengurus YPTKSW menyampaikan beberapa hal terkait situasi kampus dan dinamika yang muncul selama masa pemilihan

tersebut serta dilanjutkan dengan penjelasan interpretasi Yayasan atas SK No. 133 tersebut. Setelah penjelasan disampaikan, berbagai tanggapan dan pertanyaan dilontarkan oleh anggota senat. Secara umum pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan membahas tentang penyesalan bahwa penjelasan ini baru disampaikan ketika unit telah selesai membahas dan menentukan nominasi calon rektor untuk di bawah ke aras senat universitas. Beberapa pertanyaan juga muncul terkait interpretasi tersebut di antaranya adalah mempertanyakan suara anggota senat yang jika calonnya sudah tereliminasi apakah dapat menentukan calon pengganti tanpa harus melaksanakan koordinasi resmi dengan unitnya? Atau mempertanyakan tentang pemilihan ulang yang dilakukan jika terdapat calon-calon tidak memperoleh persetujuan 75% dari anggota senat yang hadir apakah harus dilaksanakan saat itu juga atau pada waktu lainnya? Pada akhirnya semua yang dipertanyakan hanya dijawab dengan jawaban yang bersifat informatif karena proses pemilihan sementara terlaksana dan ketentuan tersebut sudah sementara diberlakukan sehingga bukan lagi waktunya untuk memperkarakan pelaksanaan ketentuan tersebut (Slamet Haryono, 2002).

Pelaksanaan pemilihan rektor sesuai dengan panitia dimulai pada 1 April 1993 di mana pada tanggal 2 April 1993 telah disampaikan surat edaran kepada seluruh 21 unit yang memiliki hak suara. Terhitung 15 Mei 1993, Panitia telah menerima 21 suara unit yang berisikan nominasi dari masing-masing. Pada 18 Mei 1993, panitia dengan perizinan senat membuka amplop-amplop yang berisikan nominasi nama dari masing-masing unit yang mengirimkan. Berdasarkan nominasi, terdapat tiga calon yang muncul yaitu Dr. John Ihalauw, Dr. Liek Wilardjo, dan Dr. John Titaley maka sesuai dengan ketentuan, maka ketiga calon tersebut akan melaju pada pemilihan tahap satu. Berdasarkan hasil pemilihan pada tahap senat, Liek Wilardjo memperoleh dukungan 10 suara, John Ihalauw 6 suara dan John Titaley 5 suara. Sesuai ketentuan, karena Titaley tidak memperoleh suara yang cukup untuk diajukan kembali maka pada pemilihan putaran kedua hanya terdapat 2 calon yaitu Liek Wilardjo dan

John Ihalauw. Pada pemilihan kedua, hasil yang diperoleh adalah Liek memperoleh 9 suara dan John Ihalauw memperoleh 8 suara. Terdapat beberapa unit yang memilih untuk abstain dalam pemilihan putaran kedua yang salah satunya adalah perwakilan dari Lembaga Kemahasiswaan (LK).

Berdasarkan hasil pemilihan, dua calon yang memperoleh suara terbanyak dengan persetujuan senat, akan diajukan kepada yayasan untuk diputuskan siapa yang akan menjadi rektor terpilih. Secara tertutup yayasan melaksanakan proses pemilihan rektor sesuai dengan nominasi yang diberikan oleh senat. Terdapat dua kali rapat yayasan yang dilakukan, pertama dilaksanakan pada 25 Juni 1993 namun gagal dalam karena tidak memenuhi kuorum rapat. Selanjutnya dilakukan rapat kembali pada 13 Juli yang pada akhirnya menghasilkan rektor terpilih yang secara tertutup diajukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan menjadi rektor yang baru.

Keberadaan interpretasi yang berbeda atas SK No.133 tersebut menjadi awal gesekan-gesekan. Namun pada akhirnya awal mulanya "hawa panas" dalam kemelut terlihat sejak beredarnya informasi bahwa dalam pemilihan senat ada suara yang "membelot" dari pilihannya. Perubahan suara yang diperoleh oleh Dr. Liek dari 10 menjadi 9 dan naiknya suara John Ihalauw dari 6 menjadi 8, telah mengindikasikan ada 2 suara yang secara jelas telah memilih calon yang berbeda dari yang dikehendaki oleh unitnya. Berdasarkan berbagai berita yang tersebar, diketahui bahwa dua suara yang dikatakan "berkhianat" itu adalah wakil dari Fakultas Biologi yang awalnya memilih John Titaley dan satu lagi adalah wakil Unit Pegawai (UP) yang awalnya memilih Liek Wilardjo. (Wawancara Pribadi, 16 Februari 2022). Tersebarnya informasi tersebut telah memicu pemukulan oleh salah satu pegawai UP kepada wakil mereka dalam pemilihan karena menganggap telah dikhianati oleh wakilnya sendiri.

Yayasan baru melaksanakan pemilihan pada 13 Juli 1993 di mana calon yang dipilih tidak langsung diumumkan kepada khalayak namun harus menunggu persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

sesuai ketentuan yang berlaku. Pengajuan nama ke pihak Kemendikbud dilakukan melalui pihak Kopertis Jawa Tengah oleh Yayasan. Namun ternyata hasil nama yang diajukan tersebut bocor dan sampai ketelinga khalayak kampus. Dari bocoran tersebut, diketahui bahwa Yayasan mengusulkan John Ihalauw sebagai Rektor yang baru. Hal tersebut tentu saja menimbulkan reaksi dari pihak yang mendukung Liek Wilardjo yang terdiri dari 9 anggota Senat yang secara tegas menyatakan bahwa keputusan Yayasan bertentangan dengan asas demokrasi di mana mereka menganggap bahwa Dr. Liek didukung oleh mayoritas unit dalam universitas itu sendiri (*Suara Merdeka*, edisi 20 Agustus 1993). Dalam perkembangannya, pihak yang melakukan protes tersebut dikenal dengan sebutan Kelompok 10 yang di dalamnya terdapat sosok Arief Budiman yang menjadi tokoh sentral dalam peristiwa kemelut ini.

Tuntutan kelompok 10 kepada Yayasan ternyata tidak memperoleh tanggapan yang diharapkan, bahkan tanggapan yang diberikan dapat dianggap sebagai alasan agar proses pemilihan yang sudah dilakukan pada tingkat Yayasan bisa langsung diterima saja oleh semua pihak. Hal tersebut tentu saja tidak memuaskan dan memicu respon jengkel dari pihak kelompok 10. Lebih lanjut daripada itu, Kelompok 10 menyatakan dalam versinya, proses pemilihan rektor memiliki banyak kegagalan yang bersumber dari Yayasan. Mulai dari menyamaratakan calon yang dipilih oleh unit tanpa harus memperhatikan jumlah dukungan yang berujung pada berbagai pertanyaan terkait kenapa pemilihan tingkat unit diarahkan begitu demokratis dan rumit sementara hasilnya kurang diperhitungkan. Hal yang lain adalah hilangnya hak suara dari anggota senat yang tidak mewakili unit, padahal pada prinsipnya mereka juga merupakan anggota senat yang sah. Kelompok 10 berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan sudah mencederai prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dalam pemilihan tingkat unit dan senat yang pada akhirnya mencederai proses peralihan kepemimpinan pada ranah Universitas.

Pada 27 November 1993, Mendikbud mengeluarkan Surat Keputusan untuk menetapkan John Ihalauw (JOI) sebagai rektor

UKSW 1993-1997 (*Pamflet Demokrasi*, No. 4, Juli 1994). Yayasan memberikan penjelasan bahwa pertimbangan mereka mengajukan JOI adalah dengan mengingat perkembangan universitas dalam masa 4 tahun mendatang (Slamet Haryono, 2002). Dilain kesempatan Haryono Semangun selaku ketua pengurus yayasan menyampaikan bahwa setelah melihat keadaan UKSW, calon rektor mendatang haruslah orang yang bisa melakukan manajemen kelembagaan dan dapat berhubungan dengan luwes.

Hasil dari pemilihan rektor ini pada akhirnya menyebabkan seruntutan aksi dan protes yang secara beruntun terjadi mulai dari unjuk rasa, aksi mogok baik mogok dalam proses belajar mengajar yang dikenal sebagai moratorium. Dalam beberapa surat kabar juga disampaikan bahwa terdapat aksi mogok makan oleh beberapa mahasiswa seperti dalam terbitan "*Kedaulatan Rakyat*" edisi 10 dan 14 Oktober 1993 yang menyatakan bahwa aksi mogok makan dilakukan oleh 4 mahasiswa sebagai buntut dari kemelut yang berkepanjangan dan meminta kepada gereja-gereja pendukung mengambil tindakan serius terhadap kemelut yang terus berlarut-larut. Dalam perkembangannya, kelompok 10 yang merupakan kelompok pendukung pak Liek Wilarjo akhirnya menyatakan diri sebagai Kelompok Pro Demokrasi (KPD) kelompok inilah yang selanjutnya menjadi salah satu pihak yang paling gentol dalam melaksanakan aksi protes terhadap pimpinan terpilih. Salah satu tokoh kunci dalam kelompok ini adalah Arief Budiman yang merupakan seorang pengajar pada Program Pascasarjana.

Berbagai aksi yang dilakukan baik secara masif maupun aktif pada akhirnya menimbulkan reaksi dari pimpinan yayasan dan universitas yang bermuara pada terdapatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 10 Maret 1994 oleh pimpinan yayasan dan universitas untuk memberikan teguran terhadap 2 staf pengajar pasca sarjana yaitu Arief Budiman dan Ariel Heryanto yang dianggap menjadi pemicu berbagai aksi (*Pamflet Demokrasi*, No. 4, Juli 1994). Salah satu puncaknya adalah dikeluarkannya surat yayasan yang

memberhentikan Arief Budiman sebagai tenaga pengajar pada 25 Oktober 1994.

Pemberhentian tersebut tentu saja menjadi penyulut baru terhadap berbagai gelombang protes yang terjadi selama bulan-bulan bahkan tahun setelahnya yang selalu berujung pada pergesekan antara KPD dengan kelompok Pro Universitas yang menamakan diri sebagai "Penyelaman dan Penegak UKSW" (PPU). Beberapa aksi yang terliput oleh media pasca pemecatan Arief Budiman yaitu seperti mogok kuliah yang disampaikan dalam harian "*Kedaulatan Rakyat*" edisi Kamis 8 Desember 1994 yang menjelaskan aksi mogok yang dilakukan mengatasnamakan mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian sebagai respon kekecewaan terhadap "pengingkaran" yayasan terhadap hasil kesepakatan Kaliurang yang sebelumnya sudah dilakukan. Selaras dengan itu pada hari selanjutnya yaitu 9 Desember 1994 dalam harian "*Kedaulatan Rakyat*" disampaikan bahwa pemogokan semakin meluas ke Fakultas Sains dan Matematika (FSM), Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (JPMIPA) dan Program Pasca Sarjana Studi Pembangunan (PPS-SP). Mereka menyatakan bahwa situasi yang tidak tentram sangat mengganggu proses belajar mengajar sedangkan dari PPS-SP menyatakan bahwa Dr. John Ihalauw harus turun dari kursi rektor.

Perlu diketahui bahwa pertemuan di Wisma Kinasih Kaliurang Yogyakarta pada 14-15 November 1994 merupakan momentum ketika Yayasan dan KPD dapat didudukkan dalam satu pertemuan bersama untuk membahas penyelesaian kemelut tersebut yang difasilitasi oleh salah seorang anggota kehormatan YPTKSW yaitu Drs. Radius Prawiro yang juga merupakan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) (Slamet Haryono, 2002:126). Mengutip dalam ulasan Presidium Mahasiswa Fakultas Pertanian pada Juni 1995 yang bertajuk "Kemelut UKSW (ulasan secara kronologis)" menyatakan bahwa salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah akan dibentuknya presidium rektorat sementara yang akan menjakan fungsi rektorat dalam kurun waktu tertentu sampai kondisi kampus kembali kondusif. Kesepakatan tersebut dikatakan

sangat disambut baik oleh kedua pihak khususnya KPD sebagai pihak yang secara aktif melakukan protes. KPD dengan sukarela menurunkan berbagai poster protes maupun membongkar tenda-tenda keprihatinan dan mau untuk menjalankan proses perkuliahan seperti semula.

Namun semua kesepakatan tersebut buyar setelah pengurus YPTKSW pada seminggu setelahnya menyatakan bahwa apa yang disepakati pada hari sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kampus UKSW (Presidium Mahasiswa Fakultas Pertanian, 1995). Hal tersebut tentu saja menimbulkan respon yang tidak positif dari banyak kalangan *civitas akademika* yang pada akhirnya meyusul serangkaian demonstrasi yang berturut-turut terjadi. Secara analisis sederhana, apa yang dilakukan oleh yayasan ini dapat dipandang sebagai sebuah inkonsistensi yang sangat merugikan mengingat baik Kurniawan dalam Slamet Haryono (2002) maupun Presidium Mahasiswa Fakultas Pertanian (1995) sama-sama menyatakan bahwa yayasan telah mencemari kesepakatan yang adalah hasil dari perundingan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Lembaga Kemahasiswaan dan Gerakan Mahasiswa di Tengah Konflik UKSW

Sejak awal proses pemilihan rektor, LK memang sudah dapat dikatakan terlibat aktif dalam memberikan pandangan serta pilihan. Keterlibatan ini tidak lepas dari hak LK yang di amanatkan oleh Statuta tahun 1988 bahwa terdapat 2 wakil mahasiswa yang menjadi anggota senator dan berhak mewakili unit mahasiswa dalam penyampaian aspirasi pada forum rapat senat universitas. Hal ini menjadi sebuah keunikan tersendiri di mana dalam forum perwakilan dan permusyawaratan tertinggi sebuah universitas, ada keterlibatan unsur mahasiswa aktif dalam pembahasan dan pengambilan keputusan.

Pada periode itu, yang menjadi perwakilan mahasiswa dalam forum senat universitas adalah Ketua Umum SMU a.n John Theodore dari Fakultas Ekonomi dan Ketua Umum BPMU a.n Theofransus Litaay dari Fakultas Hukum. Sejak awal, sudah ada langkah yang diambil oleh

LK untuk mengantisipasi adanya gesekan-gesekan dalam tubuh salah satunya dengan sejak awal membicarakan siapa yang akan dicalonkan sebagai “calon rektor” yang memenuhi profil dan analisa kebutuhan masa depan UKSW. Pada akhirnya dari pembahasan pada Februari 1993 dan bermuara pada Sidang Pleno Pimpinan LK UKSW pada 16 Mei 1993, terdapat dua hasil yang disepakati yaitu pertama memilih John Titaley sebagai nominasi dari atas nama mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan) dan kedua jika nominasi dari mahasiswa tidak lolos dalam tahap pemilihan senat, maka wakil mahasiswa akan bersikap *abstain* untuk memastikan bahwa LK tetap konsisten pada pilihannya sebagai wujud integritas, obyektifitas dan kemandirian LK terkait pilihannya (Yafet Rissy, 2013). Jika melihat dari langkah yang diambil, dapat dikatakan bahwa sejak awal proses pemilihan rektor, LK sudah berusaha menempatkan diri sebagai unit yang menyuarakan calon yang berasal dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga menurut Neil Rupidara dalam wawancara pribadi pada 16 Februari 2022, langkah *abstain* jika calon LK tereliminasi merupakan wujud dari konsistensi lembaga atas pilihan serta usaha untuk tidak sepenuhnya terlibat dalam potensi gesekan yang bisa saja terjadi.

Pada pertengahan tahun 1993 LK sedang melaksanakan proses pergantian kepemimpinan dari periode 1992/1993 kepada periode 1993/1994 yang sebenarnya dapat dikatakan berjalan dengan cukup lancar. Namun yang harus disadari bahwa periode 1993/1994 sedang dinanti oleh sebuah situasi “panas” yang sementara bertumbuh. LK melihat bahwa sejak awal proses pemilihan rektor, suasana kampus sudah semakin “hangat” sehingga dengan keprihatinan akan situasi, LK menyampaikan surat keprihatinan yang pada intinya mengajak semua pihak pendukung para calon untuk tetap mengedepankan nilai-nilai persekutuan Kristen dan demokratis dalam segala macam kepentingan masing-masing (Wawancara Pribadi, 16 Februari 2022).

Melalui surat tertanggal 18 Mei 1993, LK menyampaikan sebuah hasil bahasan berupa Pokok-Pokok Pikiran Mahasiswa terkait keberadaan Rektor yang ideal dan Penataan

Terhadap UKSW di masa mendatang (Yafet Rissy, dkk, 2013). LK menyampaikan bahwa keberadaan Rektor yang ideal harus dibarengi dengan pandangan dan pemahaman terhadap ideologi UKSW yang lebih merata sehingga pada pengimplementasiannya, semua pihak dapat memahami dengan baik dan semua perencanaan berjalan pada koridor yang sesuai.

Pada proses pemilihan rektor, calon yang diajukan oleh LK pada akhirnya harus gugur karena tidak memperoleh suara yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Maka sesuai kesepakatan yang sudah diambil sebelumnya, maka pada pemilihan putaran selanjutnya LK akan bertindak abstain. Perkembangan situasi pasca bocornya informasi calon yang dipilih oleh Yayasan terus mendorong LK dalam sebuah pusaran konflik yang semakin terlihat. Tertanggal 24 November 1993, LK menyampaikan surat pernyataan kepada Yayasan yang secara garis besar adalah mendukung sepenuhnya keputusan terhadap Rektor Terpilih dan menyuarakan bahwa persatuan dan persaudaraan dalam lingkup kampus harus tetap terpelihara.

Tertanggal 22 April 1994, di tengah situasi yang semakin panas, LK kembali melayangkan surat yang berisikan keprihatinan terhadap konflik yang seakan-akan tidak akan ada habisnya. Surat tersebut ditujukan kepada berbagai pihak mulai dari Yayasan, Gereja-Gereja Pendukung, Senat UKSW, Pimpinan Unit, Pengajar dan Pegawai serta Mahasiswa UKSW. Namun dari semua hal tersebut muncul sebuah pertanyaan, dimanakah posisi LK saat itu? Kemana arah keberpihakan LK saat itu?. Jika kita melihat dari beberapa langkah yang diambil sejak awal proses pemilihan, kita dapat melihat bahwa terdapat dua hal yang dapat dikatakan berkontradiksi. Pertama adalah sejak awal LK sudah mengatakan bahwa jika calon yang disampaikan tidak terpilih maka LK akan mengambil sikap untuk netral terhadap calon yang lain. Sehingga apakah dapat dikatakan bahwa LK sejak awal tidak ingin terjerumus lebih jauh?. (Yafer Rissy dkk, 2013) namun disisi lain, saat peralihan kepemimpinan dari periode 1992/1993 kepada periode 1993/1994 kita dapat melihat adanya pergeseran pandangan yang pada akhirnya menerima keberadaan calon

pilihan Yayasan sebagai Rektor Terpilih dengan dalih bahwa menjaga persatuan dan kestabilan kampus adalah prioritas.

Munculnya dua kubu dalam konflik UKSW dalam hal ini KPD dan PPU telah menjadi sebuah sarana baru bagi mahasiswa untuk menyalurkan pemikiran dan tindakan sebagai respon terkait konflik yang terjadi. Kurniawan dalam Slamet Haryono (2002) menjabarkan bahwa banyak mahasiswa lebih memilih untuk ikut dalam kelompok-kelompok tersebut dikarenakan terdapat tokoh-tokoh yang dirasa mampu menjadi pionir dalam aksi, belum lagi pengaruh mayoritas pegawai yang memihak salah satu kubu secara tak langsung telah menarik mahasiswa dan LK aras fakultas masuk kedalam salah satu kelompok tersebut. Hal ini menjadi unik karena dapat dikatakan bahwa faktor tokoh dan intensitas gerakan dapat menjadi faktor pendorong pemilihan mahasiswa pada suatu kelompok untuk ikut terlibat di dalamnya.

Salah satu hal yang dapat diindikasikan sebagai keberpihakan LK fakultas pada satu kubu dapat terlihat dalam surat yang dilayangkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Teknik No. 35/SEMAFT/XII/94 kepada Pimpinan UKSW yang secara nyata mengkritik kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan menyatakan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban harus dilaksanakan oleh pimpinan universitas. Hal ini dapat dikatakan selaras mengingat sejak awal Fakultas Teknik adalah pihak yang didominasi oleh KPD.

Selama terjadinya konflik sebenarnya ada hal menarik yang dapat terlihat di mana penyampaian pendapat dan pandangan tidak hanya dilakukan melalui LK namun juga dilakukan secara pribadi maupun secara berkelompok dengan menjabarkan berbagai pandangan dan keprihatinan tersebut melalui surat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Sebagai contoh terdapat pernyataan sikap dan keprihatinan atas nama mahasiswa Fakultas Theologi yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Theologi pada 21 April 1995. Hal ini seakan menyatakan bahwa LK tidak selamanya menjadi pilihan utama dalam penyampaian aspirasi dan mahasiswa secara terbuka memiliki kesempatan untuk menyampaikan hasil pemikirannya.

Dalam perjalanannya selama konflik berlangsung, dapat terlihat bahwa LK terus menempatkan serta ditempatkan sebagai pihak yang mewakili mahasiswa. Hal ini terlihat dari keterlibatan dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh Yayasan dan Rektorat (Slamet Haryono, 2002). Namun pada akhirnya keterlibatan tersebut menimbulkan pandangan bahwa LK lebih memihak pada yayasan dan universitas dan tidak mewakili suara mahasiswa di tingkat universitas salah satunya adalah melalui mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 13 Pimpinan LK aras fakultas. Tentu saja LK aras universitas memperhatikan mosi yang dilayangkan tersebut, Hida Diyanto selaku ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas (BPMU) dalam Slamet Haryono (2002) menjabarkan bahwa terkait mosi tersebut, LK aras universitas sudah mengusahakan forum untuk membahas hal tersebut namun pada akhirnya tidak terealisasi karena ketidakhadiran LK fakultas dengan berbagai alasan yang disampaikan.

Hal tersebut menjadi salah satu hal cukup disoroti, walaupun pada akhirnya secara resmi ditanggapi oleh Senat Mahasiswa Universitas (SMU) sebagai cabang eksekutif LK aras universitas melalui surat nomor 1st/SMU/UKSW/XII/1994 yang secara tegas memberikan klarifikasi terhadap berbagai hal yang ditujukan kepada LK aras universitas. Keberadaan mosi tidak percaya ini ternyata tidak luput dari perhatian mahasiswa, salah satunya adalah keberadaan surat terbuka yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswi bernama Ike yang memberikan pandangan serta keprihatinannya terhadap keberadaan mosi tidak percaya ini. Respon lainnya juga muncul dalam buletin "*Media Informasi Mahasiswa FH UKSW*" edisi keempat Desember 1994 yang menjabarkan keprihatinan terhadap keberadaan mosi tidak percaya tersebut. Jauh daripada itu, dapat terlihat bahwa keberadaan LK sebagai organisasi mahasiswa masih diperhatikan oleh kalangan mahasiswa.

Sepanjang terjadinya kemelut terdapat hal yang menarik yaitu keberadaan pamflet atau surat kabar yang dikeluarkan oleh mahasiswa baik yang mengatasnamakan perorangan maupun kelompok tertentu termasuk LK itu

sendiri. Perlu diketahui bahwa periode terjadinya kemelut masih dalam masa pemerintahan Orde Baru yang mana selama masa tersebut banyak pembatasan terhadap media-media masa yang beredar khususnya yang terindikasi memberikan kritik kepada pemerintah. Aryo Subarkah (2021) menjabarkan pada masa Orde Baru, terdapat sebuah bentuk aliran pers yang disebut dengan pers alternatif yaitu sebuah aliran dalam pers yang secara nyata melakukan perlawanan kepada media atur utama (oleh negara atau lembaga resmi). Salah satu bentuk media alternatif tersebut adalah media mahasiswa yang dikelola berdasarkan pemikiran dan suara dari mahasiswa itu sendiri.

Beberapa pamflet atau media surat kabar mahasiswa yang beredar selama periode kemelut UKSW adalah: *Suara Mahasiswa*, *Viva Justitia*, *Pro Justitia* dan *Media Informasi Mahasiswa FH UKSW*. dari Fakultas Hukum serta *Journal LK*. Kesemuanya itu telah menjadi sarana untuk mahasiswa menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka terkait segala sesuatu yang terjadi selama periode kemelut. Jika diperhatikan secara saksama, media-media mahasiswa tersebut tidak hanya membahas pandangan-pandangan bebas terkait kemelut namun juga menyoroti bagaimana keberadaan serta peran LK selama periode tersebut. Salah satu ulasan yang menjabarkan peran LK adalah dalam *Viva Justitia* Edisi VII 28 Juni 1995 yang bertajuk *Like Master, Like Servant* disampaikan bahwa LK Fakultas Hukum telah memprakarsai sebuah forum terbuka untuk penjelasan terkait Kuliah Blok yang dilaksanakan oleh kampus pada masa itu. Selain itu juga LK telah memanfaatkan media cetak untuk menjadi sarana informasi dari berbagai aktivitas kampus salah satunya melalui buletin *Journal LK* yang terbit setiap bulannya. Namun jika didalami ada hal yang dapat menjadi sorotan terkait konten yang dimuat. Media-media tadi yang mengatasnamakan mahasiswa secara umum lebih banyak mengulas tentang pandangan serta kritik terhadap hal-hal yang terjadi selama periode kemelut baik itu yang melibatkan LK sebagai topik utama maupun hal lainnya. Sebaliknya, media yang menggunakan *label* LK justru lebih banyak memuat informasi-informasi umum terkait aktivitas kampus maupun hal-hal

lain yang kebanyakan tidak bersangkut-paut dengan kemelut. Hal ini dapat disimpulkan secara sederhana bahwa LK telah menempatkan diri untuk tidak secara langsung menambah “keruh” suasananya yang ada, namun sebaliknya tetap berfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan dan organisasi.

Selama periode kemelut UKSW berlangsung, sebenarnya LK tidak serta merta hanya berkecimpung dalam berbagai langkah penyelesaian masalah, namun lebih dari itu LK tetap bergerak untuk memfasilitasi pengembangan mahasiswa dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. LK Periode 1992-1993 memfokuskan diri pada pengembangan kemahasiswaan yang ingin dicapai melalui implementasi Skenario Pola Pembinaan Mahasiswa (SPPM) pada seluruh program kerja dan kegiatan melalui perwujudan bidang *humanistic skill* dan *profesional skill*. Beberapa program kerja yang dilaksanakan pada periode 1992-1993 di antaranya adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional UKSW ke-4 pada 27-30 September 1993, Latihan Lanjut Kepemimpinan Mahasiswa (LLKM) pada tanggal 26 Juni-2 Juli 1993 dan Pekan Film Internasional pada 26-29 September 1993. Pada periode selanjutnya yaitu 1993-1995 yang merupakan periodisasi yang berjalan sepenuhnya dalam pusaran konflik, LK masih tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan kemampuan mahasiswa. Beberapa kontribusi yang diberikan di antaranya adalah penyelenggaraan acara Festival Pendidikan Internasional dan Festival Film Internasional sebagai bentuk kesadaran LK terhadap dorongan globalisasi yang ada. Pada bidang kepemimpinan, LK periode ini berusaha untuk melakukan peninjauan terhadap kurikulum pendidikan kepemimpinan mahasiswa dengan melibatkan pihak-pihak lainnya yang merupakan senior-senior LK pada periode sebelumnya. Hasilnya adalah terbentuknya kurikulum kepemimpinan yang dapat dianggap cukup komprehensif serta pengembangan model pelatihan dari awalnya hanya dua yaitu tingkat dasar dan lanjut, menjadi tiga tahap yaitu dasar, menengah dan lanjut (Yafet Rissy dkk. 2013: 144-146).

Berdasarkan pada hal-hal tadi dapat dilihat bahwa keberadaan kemelut tidak

sepenuhnya membuat LK hanyut dalam berbagai gejolak yang terjadi, namun justru LK tetap mampu bergerak sebagaimana yang diharapkan sebagai sebuah unit organisasi mahasiswa yang dapat memfasilitasi kebutuhan akan pengembangan kemampuan mahasiswa diluar proses akademik dari kampus. Sejalan juga dengan itu, LK dapat dipandang masih tetap bisa terlibat dalam proses penyelesaian kemelut sehingga dapat dilihat adanya usaha LK untuk menyeimbangkan diri terhadap tuntutan dari “dua arah” yaitu dari mahasiswa dan harapan keberadaan dalam perguruan tinggi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran di atas terhadap kemelut UKSW tahun 1993-1995 dan LK sebagai organisasi mahasiswa intra kampus pada masa itu dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi hasil analisis akhir dari penelitian ini. Kemelut 1993-1995 telah menjadi sebuah peristiwa konflik internal yang sangat mempengaruhi perkembangan kampus UKSW. Adanya kepentingan serta pandangan dari berbagai pihak telah memunculkan beragam gesekan yang terjadi di antara pemangku kepentingan. Mahasiswa sebagai bagian terbesar dalam kampus tentu saja tidak luput dari kemelut yang terjadi. Berbagai hal yang terjadi telah menyulut perhatian mahasiswa untuk ikut terlibat dengan berbagai aksi dan gerakan dari pihak-pihak berkonflik yang *notabene* adalah para dosen yang mendidik mereka. Keterlibatan mahasiswa telah dijemput baik secara perorangan maupun kelompok. LK telah hadir di UKSW untuk menjadi salah satu wahana aspirasi konstruktif dalam menyampaikan dan mengusahakan aspirasi serta kebutuhan mahasiswa. Sejak awal LK telah diperhadapkan pada 2 tuntutan yaitu dari sisi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi terkait dengan konflik yang terjadi serta disisi lain, LK merupakan bagian dari kampus yang seharusnya dapat menempatkan diri secara bijaksana dalam merespon konflik. Keterlibatan 2 pimpinan LK yang menjadi wakil resmi mahasiswa dalam forum Senat Universitas telah menjadi gambaran nyata akan keterlibatan LK dalam proses kemelut.

Proses-proses awal telah ditempuh LK untuk dapat membawa aspirasi mahasiswa terkait rektor yang diharapkan serta dengan konsisten tidak akan menempuh pilihan lainnya selama proses pemilihan. Namun pada akhirnya segala yang terjadi sepanjang kemelut ternyata telah menjerumuskan LK juga dalam perpecahan secara internal. Keterlibatan dalam berbagai penyelesaian masalah dari pihak kampus telah membawa opini bahwa LK hanya menjadi wadah kampus untuk mengatasnamakan mahasiswa secara keseluruhan. LK juga tidak sertamerta dapat menyatukan pandangan mahasiswa sehingga pada akhirnya tidak menjadi wadah sentral pergerakan namun mereka lebih memilih untuk terlibat dalam kelompok di luar LK dan melaksanakan gerakan secara mandiri.

Hal ini telah menunjukkan bahwa mahasiswa telah terdorong untuk merespon keprihatinan yang muncul dalam diri terhadap situasi yang terjadi disekitarnya dan tidak serta merta hanya duduk memperhatikan. Berbagai hal telah ditempuh seperti mengikuti langkah mogok kuliah, penyampaian kritik melalui media cetak maupun serangkaian aksi-aksi lain. Hal ini menjadi unik karena seperti kita ketahui pada masa Orde Baru menjelang reformasi, sangat banyak pembatasan media-media yang bersifat kritis terhadap permasalahan khususnya kepada pemerintah tetapi dengan keberadaan pamflet-pamflet serta buletin yang beredar pada masa itu, dapat dikatakan bahwa penyampaian pendapat dan pandangan kritis melalui media masih ada dan terus terjaga bahwa tumbuh subur dikalangan mahasiswa. Namun sangat disayangkan berbagai aksi yang dilakukan mendapatkan respon yang tidak memuaskan sehingga justru hal-hal yang bersifat negatif terus berlangsung selama tahun-tahun konflik tersebut. Pergerakan dalam LK pun seakan terpecah baik antara LK Universitas dan Fakultas maupun antar sesama LK Fakultas. Fakultas yang masuk dalam kelompok kontra rektorat biasanya mendapatkan dukungan dari LK nya yang menjadi salah satu pilihan basis pergerakan. Begitu juga sebaliknya LK yang fakultasnya mendukung pihak rektorat mengikuti langkah fakultasnya walaupun pada akhirnya ikut menjadi kontra seperti yang terjadi pada LK FEB.

Pada akhirnya dapat dilihat keberadaan LK selama kacah kemelut, walaupun harus menghadapi situasi yang sulit, LK masih tetap dapat mempertahankan eksistensi serta keberadaannya sebagai organisasi dan wadah aspirasi mahasiswa sampai hari ini dalam tubuh Universitas Kristen Satya Wacana. Hiduplah Garbah Ilmiah Kita, Viva Mahasiswa Satya Wacana!

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Carsel HR, Syamsunie. 2020. *Budaya Akademik dan Kemahasiswaan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Gottschalk, Louis. 1984. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Linton, Ralph. 1956. *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts.

Notohamidjojo, O. 2011. *Kreativitas yang Bertanggung jawab*. Salatiga: UKSW.

Rissy, Yafet Y. W. dkk. 2013. *Sejarah Lembaga Kemahasiswaan dan Pembinaan Mahasiswa*. Salatiga: Satya Wacana University Press.

Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik, Teori-Teori dan Analisis (edisi ketiga)*. Jakarta: Kencana.

Jurnal Online

Eddyono, Aryo Subarkah. 2021. Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakan hingga Dibungkam. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi* (Online). Vol. 08 No 01. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/komunika/article/view/5672/2419>. Terakhir diakses 2 Juni 2022.

Jazimah, Ipong. 2013. Malari: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Jurnal Agastya: Jurnal Sejarah dan*

Pembelajarannya (Online). Vol. 03 No. 01. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/902/814> terakhir diakses 2 Juni 2022.

Sumber Online Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online/daring (dalamjaringan). <https://www.kbbi.web.id/>. Diakses pada 9 Juni 2022.

Kurniawan, Budi. 2002. *Kemelut UKSW 1993-1995*. (Online). (<https://slamethodotkom.wordpress.com/2002/11/04/kemelut-uksw/>). Diakses sejak 12 Juli 2021-15 Mei 2022.

Peraturan atau Ketentuan

Lembaga Kemahasiswaan. 2011. *Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa*. UKSW. Salatiga.

UKSW. 1988. *Statuta*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

UKSW. 2016. *Statuta*. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi (Online). <http://diktis.kemendiknas.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2021-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf> diakses terakhir pada 9 Juni 2022.

Wawancara

Rupidara, Neil Samuel. 2022. "Lembaga Kemahasiswaan dalam Kemelut UKSW 1993/1995". *Hasil Wawancara Pribadi*: 16 Februari 2022. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Pamphlet, Surat Terbuka dan Surat Kabar Sezaman

Ads. 10 Oktober 1995. "4 Mahasiswa UKSW Mogok Makan". *Kedaulatan Rakyat*.

Ads. 14 Oktober 1995. "Ditandai Penurunan Merah Putih, Mogok Makan di UKSW Berakhir". *Kedaulatan Rakyat*.

Biro Humas UKSW. 1993. Surat Pengantar dan *Press Release* Pelantikan Rektor Baru. Nopember, 3.

HS. 4 Mei 1995. Seputar LK. *Pro Justitia*. hlm 2.

Ike. 1994. "Surat Terbuka Tentang Mosi Tidak Percaya Lembaga Kemahasiswaan (LK).

Journal LK. Desember 1994. Hlm 1-12

Pamphlet Demokrasi. 1994. "Buletin Kelompok Independent UKSW". Juli. No.

Presidium Mahasiswa Fakultas Pertanian. 1995. *Kemelut UKSW (ulasan secara kronologis)*.

Redaksi, 20 Agustus 1993. "Unit-Unit mengajukan Lieak sebagai calon rektor". *Suara Merdeka*.

Redaksi, 23 Agustus 1993. *Suara Merdeka*.

Redaksi, Edisi VII 28 Juni 1994. "Like Master, Live Servant". *Viva Justitia*. Hlm 1-2.

Redaksi. No. 4, Desember 1994. "Sarana Tukar Menukar Informasi". *Media Informasi Mahasiswa FH UKSW*.

Redaksi. 8 Desember 1994. "Aksi Mogok kuliah oleh Mahasiswa". *Kedaulatan Rakyat*.

Redaksi. 9 Desember 1994. "Aksi Mogok semakin meluas". *Kedaulatan Rakyat*.

Senat Mahasiswa Universitas, Universitas Kristen Satya Wacana. 1994. Edaran Kepada Mahasiswa No. 1st/SMU/UKSW/XII/1994. Tentang Klarifikasi Persoalan.

Senat Mahasiswa Fakultas Teknik, 1994. Surat No. 35/SEMAFT/XII/94 Tentang respon situasi terkini.

Steel, 15 Juni 1995. Antara Mogok dan Moratorium. *Viva Justitia*. Hlm 1.

Twi-Q, Saut. 14 Desember 1994. Info: Pemogokan, Surat Pembaca. *Suara Mahasiswa* hlm 1-2.

Wisnu Th, 25 Juni 1993. "Pemilihan Rektor di UKSW". *Suara Merdeka*.